

**FORMULASI PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:

AL-FAJRI

1910842033



Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Desna Aromatica, S.AP.,M.AP**
- 2. Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.SC**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

ABSTRAK

Al-Fajri, Nomor Induk Mahasiswa 1910842033, Formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang 2023. Dibimbing oleh: Dr. Desna Aromatica S.AP., M.AP dan Dr. Hendri Koeswara S.IP., M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari () halaman, menggunakan referensi yakni 38 buku , 5 buku metode 11 artikel ilmiah, 15 peraturan perundang-undangan, dan 3 website/internet.

Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini disebabkan karena telah terjadinya deindustrialisasi di Kota Padang yang ditandai dengan menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang pada Tahun 2017 hingga 2019. Selain itu, adanya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah Kota Padang yang menunjukkan bahwa permasalahan deindustrialisasi di Kota Padang perlu untuk segera diatasi. Dalam rangka menyikapi permasalahan deindustrialisasi dan tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah Kota Padang tersebut, pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan yaitu teori Formulasi Kebijakan Publik menurut Carl V Patton dan David Sawicky. Berdasarkan teori tersebut proses formulasi kebijakan dimulai dari mendefinisikan masalah, menentukan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, memilih alternatif kebijakan, dan mengimplementasikan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah masih belum sesuai dengan Model Formulasi Kebijakan menurut Carl V Patton dan David Sawicky. Hal itu disebabkan karena di dalam proses formulasi kebijakan tersebut Pemerintah Kota Padang tidak melakukan: pemaparan mengenai potensi biaya dan manfaat dari kebijakan, dan pengkajian ulang terhadap permasalahan. Sedangkan pada implementasinya ditemukan bahwa masih terdapat bagian yang mengalami *program failures* karena masih belum dimasukkannya Pengembangan Produk Unggulan Daerah ke dalam RPJPD dan RTRW Kota

Padang dan hingga saat ini Wali Kota Padang juga masih belum mengeluarkan keputusan terkait Produk Unggulan Daerah Kota Padang setelah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dikeluarkan. Selain itu, dalam implementasinya juga terjadi *Theory Failures* yang disebabkan belum seriusnya Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Produk Unggulan Daerah, Program Failure, Theory Failure.



ABSTRACT

Al-Fajri, Student Identification Number 1910842033, Formulation of Mayor of Padang Regulation Number 88 of 2020 Concerning the Development of Regional Superior Products, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang City 2023. Supervised by: Dr. Desna Aromatica S.AP., M.AP and Dr. Hendri Koeswara S.IP., M.Soc.Sc. This thesis consists of () pages, using references namely 38 books, 5 methods book, 11 scientific articles, 15 laws and regulations, and 3 websites/internet.

The background for conducting this research was due to deindustrialization in the city of Padang which was marked by a decrease in the contribution of the processing industry to the Gross Regional Domestic Product of Padang City from 2017 to 2019. In addition, there are demands from IKM actors in the City of Padang which indicates that the problem of deindustrialization in the City of Padang needs to be addressed immediately. In order to address the problem of deindustrialization and the demands of the Small and Medium Industry players in the City of Padang, in 2020 the Padang City Government has a Regional Superior Product Development Policy through the Mayor of Padang Regulation Number 88 of 2020 concerning the Development of Regional Superior Products.

The research method is descriptive qualitative. While the data collection techniques used in this study were interviews, documentation, and observation. The theory used is the theory of Public Policy Formulation according to Carl V Patton and David Sawicky. Based on this theory, the policy formulation process starts from defining the problem, determining evaluation criteria, identifying alternative policies, evaluating alternative policies, selecting alternative policies, and implementing policies.

The results of the research show that in the formulation process the Mayor of Padang Regulation Number 88 of 2020 concerning the Development of Regional Superior Products is still not in accordance with the Policy Formulation Model according to Carl V Patton and David Sawicky. This is because in the process of formulating the policy, the Municipal Government of Padang did not carry out: a presentation of the potential costs and benefits of the policy, and a review of the problems. Whereas in its implementation it was found that there were still parts that experienced program failures because the Regional Superior Product Development had not yet been included in the Padang City RPJPD and RTRW and until now the Mayor of Padang has also not issued a decision regarding the Regional Superior Product of the City of Padang after the Superior Product Development Policy. Excluded area. In addition, the implementation also occurred in Theory Failures

which were caused by the Padang City Government not being serious about implementing the Regional Superior Product Development Policy.

Keywords: Policy Formulation, Regional Superior Products, Program Failure, Theory Failure.

